

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Secara harfiah akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Menurut Tuner dan Hulme dalam Hilmi (2012), menyatakan bahwa :

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, maka pengelolaan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang harus berakuntabilitas dan ini tidak lepas dari anggaran pemerintah, sistem pengendalian dan sistem pelaporan yang baik.

Sedangkan Menurut Bastian (2010) :

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang sedang terjadi.

2.1.2 Kinerja

Kinerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, menyatakan bahwa :

“Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”

Menurut Tim AKIP BPKP dalam Wahid (2016), menyatakan bahwa :

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta

mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang dimiliki.

Menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa :

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Berdasarkan pernyataan diatas, bias disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang telah dicapai oleh organisasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Agusta (2013) menyatakan bahwa :

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan melakukan pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan kinerja periode berikutnya.

Berdasarkan Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik”.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban atas pelaksanaan kegiatan organisasi sebagai bahan evaluasi terhadap otoritas yang lebih tinggi dan juga masyarakat serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Dari sudut pandang fungsional, menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kebijakan (*Policy Accountability*)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
2. Akuntabilitas program (*Program Accountability*)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
3. Akuntabilitas proses (*Process Accountability*)
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
4. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for probity and legality*)
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Tim AKIP mengatakan ada lima prinsip akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara tersistem dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui :

 - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan terikat waktu kemudian wajib di komunikasikan kepada seluruh pegawai. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari :

 - a. identifikasi risiko
 - b. analisis risiko

Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan yang pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan

fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
 - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
 - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
 - e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
 - f. Kegiatan pengendalian di evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan Komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah berbagai bentuk sekurang-kurangnya:
- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan Pengendalian Internal
Pimpinan instansi wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit revidu lainnya.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang memperbaharui Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Saat ini telah di kenal istilah *E-Government (E-Gov)*, pemerintah digital, *online* pemerintah atau pemerintah transformasi. Melalui penerapan *E-Gov* pemerintah dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat, unit bisnis, pegawai, *stakeholder*, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dikuti dari Adi (2017) Ada tiga model penyampaian *E-Government*, antara lain:

1. ***Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)*** adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C : Pajak *online*, Mencari pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, Penanggulangan bencana.
2. ***Government-to-Business (G2B)*** adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem *e-procurement*. Contoh : Pajak perseroan, Peluang bisnis, Pendaftaran perusahaan, Peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, Hak paten merk dagang, dan lain-lain.
3. ***Government-to-Government (G2G)*** adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh: Konsultasi secara *online, blogging* untuk kalangan legislatif, pendidikan secara *online*,

pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Teknologi informasi menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Pemanfaatan Teknologi Informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini masih menjadi perhatian, antara lain:

1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
8. Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan kinerja dari suatu OPD menjadi lebih baik terutama di dalam penyusunan laporan keuangan sangatlah dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia merupakan suatu acuan dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas karena seseorang yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi pemerintahan (SAP).

Menurut Indriasih (2014) “ Sumber Daya Manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi

tujuannya “. Suatu sistem yang baik dapat berjalan dengan baik ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi Pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Menurut Yendrawati (2013) “ Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien ”.kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk mencapai kinerja serta untuk menghasilkan suatu keluaran baru (*output*) dan hasil-hasil yang diperoleh (*outcomes*).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seorang individu yang memiliki suatu kemampuan khusus, keterampilan, pengetahuan, dan memiliki suatu tanggung jawab. Menurut beberapa ahli yang mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan perilaku yang baik maka dalam pekerjaannya akan terhambat dan mengakibatkan adanya pemborosan baik dari segi waktu, uang, dan tenaga. Sedangkan menurut Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga buah komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang tertentu. Informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam kondisi nyata. Berhasil atau tidaknya sebuah tugas akan dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai. Maka dari itu pegawai yang memiliki pengetahuan cukup baik akan lebih meningkatkan efisiensi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

2. Keterampilan

Keterampilan (*skill*) merupakan upaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan sama dengan memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun berkelompok. Dalam melaksanakan tugas, selain memiliki pengetahuan yang baik, pegawai juga harus memiliki keterampilan khusus. Keterampilan ini

diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu, karena keterrampilan ini di perlukan saat berkomunikasi, memotivasi orang lain, maupun dalam menjalankan tugasnya agar terlaksana dengan mudah dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau sebuah instansi.

3. Perilaku/Sikap

Sikap adalah pola dari tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Pegawai dapat memiliki sikap yang mendukung tujuan pada sebuah organisasi. Apabila pegawai sudah memiliki sikap tersebut maka secara otomatis segala tugas yang telah dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pegawai akan merasa memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen/ Independen	Hasil
1	Muhammad syahrir, H. Hasbuddin, Erwin Hadisantoso (2019)	Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Keuangan Daerah Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bombana	X1 : Budaya Organisasi X2 : Sistem Pengendalian Intern X3 :Sistem Keuangan Daerah Akuntansi Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Budaya Organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana.

				<p>Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana.</p> <p>Budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana.</p>
2	Risky Soleman, Rusnan Soleman, Zainuddin (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	X1: Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah X2 : Kualitas Sistem Pengendalian Intern X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Minimnya pemahaman aparatur pemerintah maka semakin rendah penggunaan dan pengelolaan sistem akuntansi pemerintah daerah</p> <p>Kualitas sistem pengendalian yang baik akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>

				Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Teknologi Sangat Berperan penting dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setelah melakukan pemeriksaan.
3	Husnul Mubaraq (2017)	Pengaruh Ketaatan pada Perundang-undangan , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi pemerintah Daerah di Kota Bukit Tinggi)	X1 : Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Bukit Tinggi (Y) Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kota Bukit Tinggi (Y) Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh Signifikan Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Bukit Tinggi (Y)

4	Fitrawati, Abdul Kahar dan Muhammad Iqbal (2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Sistem Pengendalian Intern Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Sistem Pengendalian Intern memberikan pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Kejelasan sasaran Anggaran dan Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
5.	Dina Afrina (2015)	Pengaruh Penerapan Sitem Akuntanssi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	X1 : Penerapan Sistem Akuntansi X2 : Pengendalian Intern X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengendalian Intern (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Y) Sistem Pelaporan (X3) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

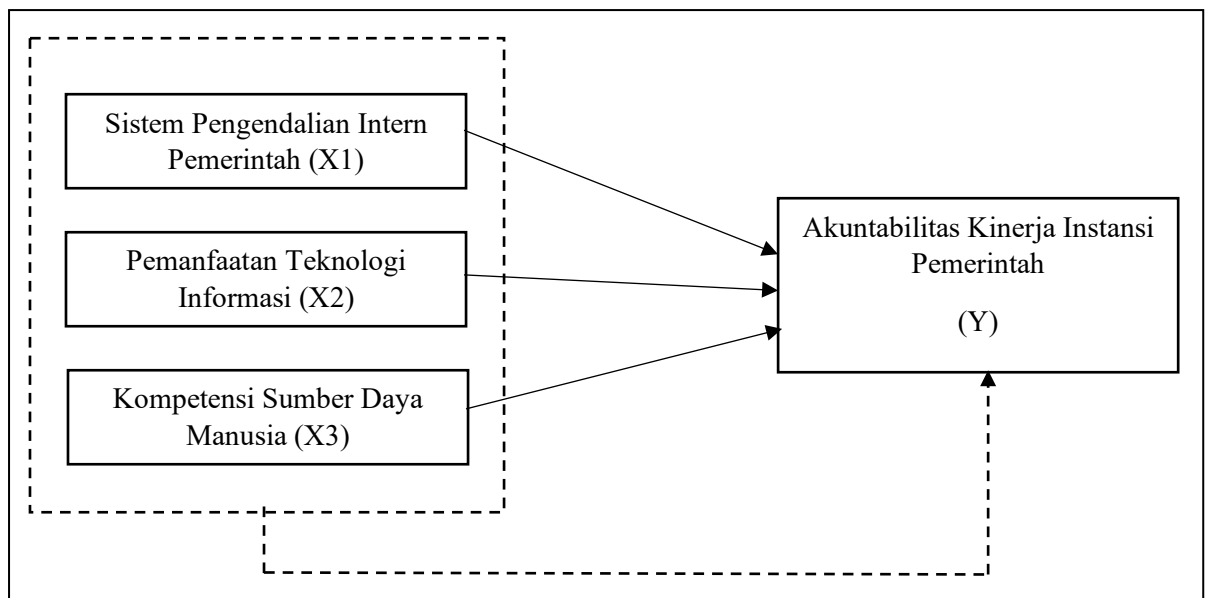
6	Irine Chintya (2015)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kota Solok)	X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 : Sistem Pengendalian Intern Y : Kinerja Instansi Pemerintah	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Y)
7	Surya Benediktus Manullang, Syukriy Abdullah (2017)	Pengaruh pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, dan pergantian kepala skpd terhadap akuntabilitas kinerja	X1 : Pengaruh Pengendalian Internal X2 : Kejelasan Sasaran Anggaran X3 : Pergantian Kepala SKPD Y : Akuntabilitas Kinerja	Pengendalian Internal, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017 Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017 Pergantian kepala SKPD berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017 Pengendalian Internal, Kejelasan sasaran anggaran dan pergantian kepala SKPD secara simultan dan Bersama-sama mempengaruhi

				akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Tahun 2017
8	Reni Febrianti , Anis feblin, Hasiatul Aini (2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten ogan komering ulu	X1 : Kejelasan Sasaran anggaran X2 : Sistem Pelaporan X3 : Pengendalian Intern Y : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	faktor factor yang menjadi variabel penelitian secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Kontribusi pengaruh yang di berikan sebesar 56,4% dalam penelitian ini, karena factor sumber daya manusia dan komitmen organisasi sebesar 43,6% tidak bias ditinggalkan untuk suatu akuntabilitas dalam suatu organisasi.
9	Argo Trihapsoro (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Boyolali)	X1 : Kualitas Sumber Daya Manusia, X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y : Kinerja Pemerintah Daerah	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki peengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

10	Nurlaili Anis (2016)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X2 : Sistem Pengendalian Intern Y : Kinerja Instansi Pemerintah	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung dan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi. Sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi OPD.
----	----------------------	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran Teoritis dapat ditunjukkan oleh model pada Gambar



Sumber : Data yang diolah, 2020

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan di teliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu sistem pengendalian

intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang ingin di uji kebenarannya dengan melihat hasil analisis dari peneliti adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 :Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?
- H2 :Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?
- H3 :Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ?
- H4 :Apakah Sistem Pengendalian Intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ?